BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak properti yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. PBB-P2 berperan sangat penting dalam mendukung program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Sejak pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola potensi PBB-P2. Otonomi ini mencakup penetapan tarif pajak, pemberian insentif, serta pengelolaan administrasi perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dengan potensi PBB-P2 yang signifikan, terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PBB-P2. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif PBB-P2 kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024. Kebijakan ini memberikan pembebasan sebagian atau seluruh pokok PBB-P2 kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Insentif ini diberikan dalam bentuk pembebasan pokok 100% untuk hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (2 Miliar Rupiah) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NIK Valid, di mana satu Wajib Pajak hanya mendapatkan pembebasan untuk satu objek PBB-P2 dengan

NJOP terbesar. Selain itu, terdapat pembebasan pokok 50% untuk objek PBB-P2 dengan SPPT PBB Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang tidak memenuhi kriteria pembebasan 100%, serta pembebasan pokok tertentu untuk objek PBB-P2 dengan kenaikan PBB-P2 tahun 2024 lebih dari 25% dibandingkan tahun 2023.

Kebijakan insentif PBB-P2 ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil dan meningkatkan keadilan serta pemerataan dalam pemungutan pajak di Jakarta. Oleh karena itu, mekanisme pemberian insentif PBB-P2 tahun 2024 pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar Jakarta Timur menjadi penting untuk memahami implementasi, dan dampak kebijakan tersebut terhadap realisasi penerimaan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pemberian insentif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2024 diterapkan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur?
- 1.2.2 Bagaimana dampak pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan terhadap Realisasi Penerimaan pada Tahun 2024 di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan mekanisme implementasi pemberian insentif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang diterapkan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Deskripsi ini meliputi tahapan, prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan insentif.
- 1.3.2 Untuk menganalisis dampak pemberian insentif PBB-P2 terhadap Realisasi Pembayaran Tahun 2024 dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Analisis ini akan mengukur

perubahan Realisasi Penerimaan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan insentif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai mekanisme insentif PBB-P2, efektivitas pemungutan pajak, dan pengelolaan PAD.
2. Menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang perpajakan daerah, yang dapat bermanfaat dalam pengembangan karir di masa depan.

1.4.2 Bagi UPPPD Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

1. Memberikan informasi dan evaluasi mengenai efektivitas penerapan mekanisme insentif PBB-P2 terhadap realisasi penerimaan.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

1.4.3 Bagi Pemerintah Daerah

1. Memberikan gambaran mengenai dampak pemberian insentif PBB-P2 terhadap realisasi penerimaan, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal daerah.
2. Mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 melalui pemberian insentif yang tepat.

1.4.4 Bagi Wajib Pajak

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme insentif PBB-P2 yang berlaku, sehingga dapat mendorong partisipasi dalam pembayaran pajak.
2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya PBB-P2 sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

1.4.5 Bagi Peneliti Lain

1. Menjadi referensi dan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas insentif pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.
2. Menyediakan data dan informasi yang relevan untuk analisis komparatif dengan daerah lain atau periode waktu yang berbeda.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5.1 Batasan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik akan dilakukan di UPPPD Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Jenis pajak yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Data dan analisis penelitian akan difokuskan pada tahun 2024. Fokus penelitian meliputi mekanisme pemberian insentif pembayaran PBB-P2 yang diterapkan serta dampak pemberian insentif tersebut terhadap realisasi penerimaan.

1.5.2 Cakupan Pembahasan

Implementasi mekanisme pemberian insentif PBB-P2 meliputi jenis-jenis insentif yang diterapkan serta kategori untuk mendapatkan insentif tersebut. Selanjutnya, dampak pemberian insentif terhadap realisasi penerimaan dianalisis melalui data penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penerapan insentif dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB dengan target yang telah ditetapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan memberikan landasan bagi penelitian ini. Latar belakang akan menguraikan konteks permasalahan, dimulai dari peran penting pajak sebagai sumber penerimaan negara dan PBB-P2 sebagai kontributor PAD. Tantangan dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2, serta urgensi inovasi seperti insentif, akan dibahas. Pemilihan Kecamatan Makasar sebagai lokasi penelitian akan dijelaskan.

Rumusan masalah akan memfokuskan penelitian pada dua pertanyaan utama yang akan dibahas pada bab Analisis dan Pembahasan. Tujuan penelitian akan menjawab rumusan masalah tersebut dengan mengidentifikasi mekanisme implementasi, mengevaluasi dampak pemberian insentif, serta mengukur efektivitas insentif.

1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, meliputi konsep PAD, pajak daerah, PBB-P2, dan insentif

1.6.3 Bab III Metode Penelitian dan Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, termasuk waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selain itu, akan diuraikan informasi umum mengenai UPPPD Kecamatan Makasar, seperti sejarah, visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang.

1.6.4 Bab IV Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menyajikan temuan-temuan penelitian dan analisis data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

1.6.5 Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis akan merangkum temuan-temuan utama dan memberikan saran yang relevan bagi berbagai pihak.